



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

### 2021/2026

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah dan kehendak-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021- 2026 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan adanya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman teknis strategik untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi atas perencanaan serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam hal penyusunannya, tentu saja baik secara materil maupun penyajian, Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Pangandaran yaitu ***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”***.

Cijulang, 15 Agustus 2021

KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**  
NIP. 19641116 199303 1 007

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | i         |
| DAFTAR ISI .....   | ii        |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 7         |
| 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis .....  | 8         |
| <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br/>             DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN .....</b>   | <b>13</b> |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....  | 13        |
| 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....  | 14        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>(BPKD) .....  | 14        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....  | 18        |
| <b>BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN<br/>             TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN<br/>             KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN .....</b> | <b>19</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan PD .....   | 19        |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah .....   | 22        |
| 3.3 Telaah Renstra Kementerian Terkait dan Dinas/Badan Terkait<br>Tingkat Provinsi Jawa Barat .....  | 22        |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis .....   | 23        |
| 3.5 Penentu Isu-Isu Strategis .....  | 24        |
| <b>BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN .....</b>   | <b>25</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....  | 25        |
| <b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>  | <b>27</b> |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah PD.....  | 27        |
| <b>BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,<br/>             KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>BAB VII    INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br/>             DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>  | <b>58</b> |



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten yang berdiri tahun 2016 sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang kedua kali dan sudah memiliki kepala daerah sebagai hasil dari proses demokrasi serta memiliki perangkat perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembangunan yang terarah tersebut maka perlu disusun perangkat perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penjabaran dari kedua perangkat perencanaan daerah tersebut maka Rencana Strategis di tiap Perangkat Daerah (Renstra PD) perlu segera disusun dan disinkronisasikan dengan pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026.

Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu dengan ditetapkannya



Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah BPKD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Pangandaran yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dan bertanggungjawab.

Dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat membantu mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang menjadi pedoman melaksanakan kegiatan setiap tahunnya (dari tahun 2021 s/d 2026).

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

**1.2.1 LANDASAN IDIIL : Pancasila**

**1.2.2 LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945**

**1.2.3 LANDASAN OPERASIONAL :**



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53).



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas Bupati terpilih. Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sehingga Perangkat Daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian program, kegiatan.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran secara optimal mendukung pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian unsur otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan, keuangan dan aset dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga melalui dokumen Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran dituangkan kedalam bentuk tujuan, sasaran,



strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di BPKD Kabupaten Pangandaran.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran; telaahan visi, misi dan program PD, dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah BPKD.

##### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan BPKD dalam lima tahun mendatang.



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran.

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat mengenai kaidah pelaksanaan yang merupakan penjelasan OPD sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menguraikan tentang dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menguraikan catatan dan harapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANSASI PERANGKAT DAERAH**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Pangandaran, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, mengacu pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan kewenangan bidang Urusan Wajib Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.



- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pendataan;
  - 2) Sub Bidang Penilaian;
  - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Penagihan;
  - 2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan;
  - 3) Sub Bidang Pemeriksaan.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  - 3) Sub Bidang Evaluasi Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Aset;
  - 3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- g. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

### **2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun 2021 adalah 40 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menurut status :
  - 1) PNS : 39 orang



- 2) CPNS : 1 orang
- 3) Tenaga Honorer : 78 orang

**TABEL 2.2.1.1**  
**JUMLAH DAN KOMPOSISI**  
**PEGAWAI BPKD KABUPATEN PANGANDARAN**

| <b>NO</b> | <b>SUB UNIT</b>                  | <b>JUMLAH</b>   |
|-----------|----------------------------------|-----------------|
| 1.        | KEPALA BADAN                     | 1 Orang         |
| 2.        | SEKRETARIAT                      | 8 Orang         |
| 3.        | BIDANG ANGGARAN                  | 4 Orang         |
| 4.        | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN   | 10 Orang        |
| 5.        | BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN   | 5 Orang         |
| 6.        | BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN | 6 Orang         |
| 7.        | BIDANG ASET DAERAH               | 6 Orang         |
|           |                                  |                 |
|           | <b>T O T A L</b>                 | <b>40 Orang</b> |

b. Menurut Golongan :

- 1) Golongan IV : 5 orang
- 2) Golongan III : 27 orang
- 3) Golongan II : 8 orang
- 4) Golongan I : - orang

c. Menurut Pendidikan :

- 1) Pasca Sarjana : 11 orang
- 2) Sarjana : 18 orang
- 3) Diploma : 3 orang
- 4) SLTA : 8 orang



- 5) SLTP : - orang
- 6) SD : - orang

d. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Jabatan

- 1) DIKLATPIM II : 0 orang
- 2) DIKLATPIM III : 1 orang
- 3) DIKLATPIM IV : 1 orang

### **2.2.2 SARANA DAN PRA SARANA**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran antara lain :

- a. Tanah seluas ..... meter
- b. Peralatan dan Mesin meliputi :
  - 1) Kendaraan Dinas
    - a) Kendaraan Dinas Jabatan
    - b) Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
    - c) Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
  - 2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - a) Mebeleur
    - b) Komputer
    - c) Laptop
    - d) Printer
    - e) Infocus
    - f) Faximili
    - g) Televisi
    - h) AC
    - i) Dispenser
    - j) Pompa air
    - k) Kulkas
    - l) Genset
    - m) Lemari Brankas
    - n) Telepon
  - 3) Alat - Alat Studio dan Komunikasi
    - a) Sound System
    - b) Wireless



- c) Keyboard
- c. Gedung dan Bangunan
  - 1) Gedung Kantor
  - 2) Bangunan
    - a) -
- d. Lain-Lain

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Rencana Kerja periode sebelumnya 2016-2021 (tersaji dalam tabel TC.23. dan TC.24.) dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan/gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu secara umum telah tercapai seluruhnya.



Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                            | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renja SKPD Tahun Ke |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun Ke |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |      |
|----|---|--------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|------|
|    |   |        |             |            |                          | 2018                       | 2019  | 2020  | 2020  | 2018                       | 2019   | 2020   | 2018                        | 2019   | 2020 |
| 1  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 100   | 81,33 | 81,33                      | 87     | 81,33  | 81,33                       | 87     |      |
| 2  | Persentase kendaraan dinas/operasional yang tersedia                      | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 0     | 74,79 | 74,79                      | 0      | 74,79  | 74,79                       | 0      |      |
| 3  | Cakupan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia            | %      |             |            |                          | 21,17                      | 21,17 | 27,48 | 24,76 | 24,76                      | 4,84   | 116,96 | 116,96                      | 17,61  |      |
| 4  | Persentase peningkatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum             | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 0     | 41,66 | 41,66                      | 0      | 41,66  | 41,66                       | 0      |      |
| 5  | Persentase gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 25,74 | 99,76 | 99,76                      | 14,06  | 99,76  | 99,76                       | 54,62  |      |
| 6  | Tingkat disiplin aparatur   | %      |             |            |                          | 0                          | 0     | 0     | 0     | 0                          | 0      | 0      | 0                           | 0      |      |
| 7  | Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 130   | 98,95 | 98,95                      | 0      | 98,95  | 98,95                       | 0      |      |
| 8  | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik                  | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 100   | 100   | 100                        | 101,13 | 100    | 100                         | 101,13 |      |
| 9  | Peningkatan aset yang tercatat  | %      |             |            |                          | 100                        | 100   | 0     | 100   | 100                        | 0      | 100    | 100                         | 0      |      |
| 10 | Cakupan ketersediaan dokumen penganggaran                                 | %      |             |            |                          | 83,33                      | 83,33 | 0     | 84,81 | 84,81                      | 0      | 101,78 | 101,78                      | 0      |      |
| 11 | cakupan penatausahaan keuangan daerah                                     | %      |             |            |                          | 10                         | 10    | 0     | 0     | 0                          | 0      | 0      | 0                           | 0      |      |



Tabel T-C.23.

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD  | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran |      |                            |      |                             |        |      |      |        |
|----|---|--------|-------------|------------|--------------------------|--|------|----------------------------|------|-----------------------------|--------|------|------|--------|
|    |   |        |             |            |                          | Target Renja SKPD Tahun Ke   |      | Realisasi Capaian Tahun Ke |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |      |      |        |
|    |   |        |             |            |                          | 2018   | 2019 | 2020                       | 2018 | 2019                        | 2020   | 2018 | 2019 | 2020   |
| 12 | Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya pertahun                          | %      |             |            |                          | 10   | 10   | 0                          | 0    | 0                           | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 13 | Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya pertahun | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 0                          | 0    | 0                           | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 14 | 'cakupan ketersediaan dokumen penganggaran  | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 100                        | 0    | 0                           | 131,43 | 0    | 0    | 131,43 |
| 15 | cakupan penatausahaan keuangan daerah   | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 83,33                      | 0    | 0                           | 94,64  | 0    | 0    | 113,57 |
| 16 | 'Peningkatan aset yang tercatat   | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 100                        | 0    | 0                           | 100    | 0    | 0    | 100    |
| 17 | Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya pertahun                          | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 10                         | 0    | 0                           | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 18 | Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya pertahun | %      |             |            |                          | 0  | 0    | 10                         | 0    | 0                           | 0      | 0    | 0    | 0      |



Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pangandaran

| Uraian                        | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |                       |                       |                       |                       | Realisasi Capaian Tahun |                       |                       |                       |                       | Rasio Capaian Pada Tahun |             |             |             |             | Rata-rata    |              |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                               | 2016                                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2016                    | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2016                     | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | Anggaran     | Realisasi    |
| 1                             | 2                                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                       | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    | 11                       | 12          | 13          | 14          | 15          | 16           | 17           |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>15.772.866.417</b>                 | <b>16.720.463.883</b> | <b>14.414.797.266</b> | <b>17.742.496.705</b> | <b>8.126.703.072</b>  | <b>13.083.466.330</b>   | <b>12.131.933.792</b> | <b>13.376.469.585</b> | <b>13.917.179.703</b> | <b>5.334.936.149</b>  | <b>0,83</b>              | <b>0,73</b> | <b>0,93</b> | <b>0,78</b> | <b>0,66</b> | <b>-0,10</b> | <b>-0,14</b> |
| Belanja Pegawai               | 15.772.866.417                        | 16.720.463.883        | 14.414.797.266        | 17.742.496.705        | 8.126.703.072         | 13.083.466.330          | 12.131.933.792        | 13.376.469.585        | 13.917.179.703        | 5.334.936.149         | 0,83                     | 0,73        | 0,93        | 0,78        | 0,66        | -0,10        | -0,14        |
| <b>Belanja Langsung</b>       | <b>17.003.813.783</b>                 | <b>17.611.318.559</b> | <b>11.293.417.800</b> | <b>15.396.985.674</b> | <b>37.798.210.729</b> | <b>13.311.098.358</b>   | <b>15.577.164.929</b> | <b>10.300.451.928</b> | <b>14.524.458.147</b> | <b>32.712.941.890</b> | <b>0,78</b>              | <b>0,88</b> | <b>0,91</b> | <b>0,94</b> | <b>0,87</b> | <b>0,37</b>  | <b>0,37</b>  |
| Belanja Pegawai               | 4.421.175.000                         | 2.076.060.000         | 1.723.890.000         | 3.668.930.000         | 8.797.795.000         | 4.039.306.250           | 2.049.210.000         | 1.676.595.000         | 3.623.050.000         | 8.406.880.000         | 0,91                     | 0,99        | 0,97        | 0,99        | 0,96        | 0,46         | 0,45         |
| Belanja Barang dan Jasa       | 8.571.658.783                         | 6.377.063.059         | 7.121.821.700         | 7.495.947.824         | 9.229.055.729         | 6.362.682.296           | 4.890.009.099         | 6.515.017.983         | 6.744.254.447         | 8.107.940.566         | 0,74                     | 0,77        | 0,91        | 0,90        | 0,88        | 0,04         | 0,08         |
| Belanja Modal                 | 4.010.980.000                         | 9.158.195.500         | 2.447.706.100         | 4.232.107.850         | 19.771.360.000        | 2.909.109.812           | 8.637.945.830         | 2.108.838.945         | 4.157.153.700         | 16.198.121.324        | 0,73                     | 0,94        | 0,86        | 0,98        | 0,82        | 1,24         | 1,27         |



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran

| Uraian   | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |               |               |               |             | Realisasi Capaian Tahun |               |               |               |             | Rasio Capaian Pada Tahun |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|  | 2016                                  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020        | 2016                    | 2017          | 2018          | 2019          | 2020        | 2016                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Anggaran              | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 1.332.203.900                         | 1.094.080.450 | 930.193.200   | 829.463.623   | 967.313.400 | 1.178.632.438           | 909.949.146   | 871.396.447   | 791.431.074   | 875.749.486 | 88,47                    | 83,17 | 93,68 | 95,41 | 90,53 | -0,07                 | -0,06     |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 2.694.341.300                         | 9.593.756.250 | 4.661.609.959 | 5.676.770.000 | 761.069.000 | 2.315.850.300           | 9.163.512.840 | 4.154.957.304 | 5.490.267.628 | 696.635.478 | 85,95                    | 95,52 | 89,13 | 96,71 | 91,53 | 0,35                  | 0,46      |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 28.000.000                            | 112.100.000   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 28.000.000              | 112.100.000   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100                      | 100   | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0         |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 25.000.000                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 9.500.000               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 38                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0         |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 46.020.000                            | 243.840.000   | 111.158.941   | 118.613.500   | 432.015.000 | 30.280.000              | 161.385.000   | 96.949.800    | 103.210.300   | 427.372.500 | 65,80                    | 66,18 | 87,22 | 87,01 | 98,93 | 1,62                  | 1,78      |



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran

| Uraian   | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |               |               |               |               | Realisasi Capaian Tahun |               |               |               |               | Rasio Capaian Pada Tahun |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|  | 2016                                  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016                    | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Anggaran              | Realisasi |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah   | 3.631.251.195                         | 7.619.719.900 | 5.590.455.700 | 8.772.138.551 | 0,00          | 2.050.124.000           | 5.631.897.332 | 5.177.148.377 | 8.139.549.145 | 0,00          | 56,46                    | 73,91 | 92,61 | 92,79 | 0     | 0,10                  | 0,31      |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa         | 0,00                                  | 68.950.000    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 44.855.800    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                        | 65,06 | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0         |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.506.927.000 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.197.987.800 | 0                        | 0     | 0     | 0     | 95,25 | 0                     | 0         |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.957.989.329 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.654.232.570 | 0                        | 0     | 0     | 0     | 93,87 | 0                     | 0         |



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran

| Uraian                                      | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |      |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |   |
|---|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|---|
|   | 2016                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran              | Realisasi |   |
| Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah | 0,00                                  |      | 0,00 |      | 0,00 | 21.729.602.500          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.697.172.545           | 0    | 0    | 0    | 0    | 81,44                 | 0         | 0 |
| Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah   | 0,00                                  |      | 0,00 |      | 0,00 | 1.179.045.000           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.724.802            | 0    | 0    | 0    | 0    | 88,95                 | 0         | 0 |
| Program Pengelolaan Pajak Daerah            | 0,00                                  |      | 0,00 |      | 0,00 | 679.249.500             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.796.089              | 0    | 0    | 0    | 0    | 91,39                 | 0         | 0 |



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BPKD Kabupaten Pangandaran disertai tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dari pemerhatian kondisi eksternal maupun internal dan data ancaman/ tantangan (*Threats*) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

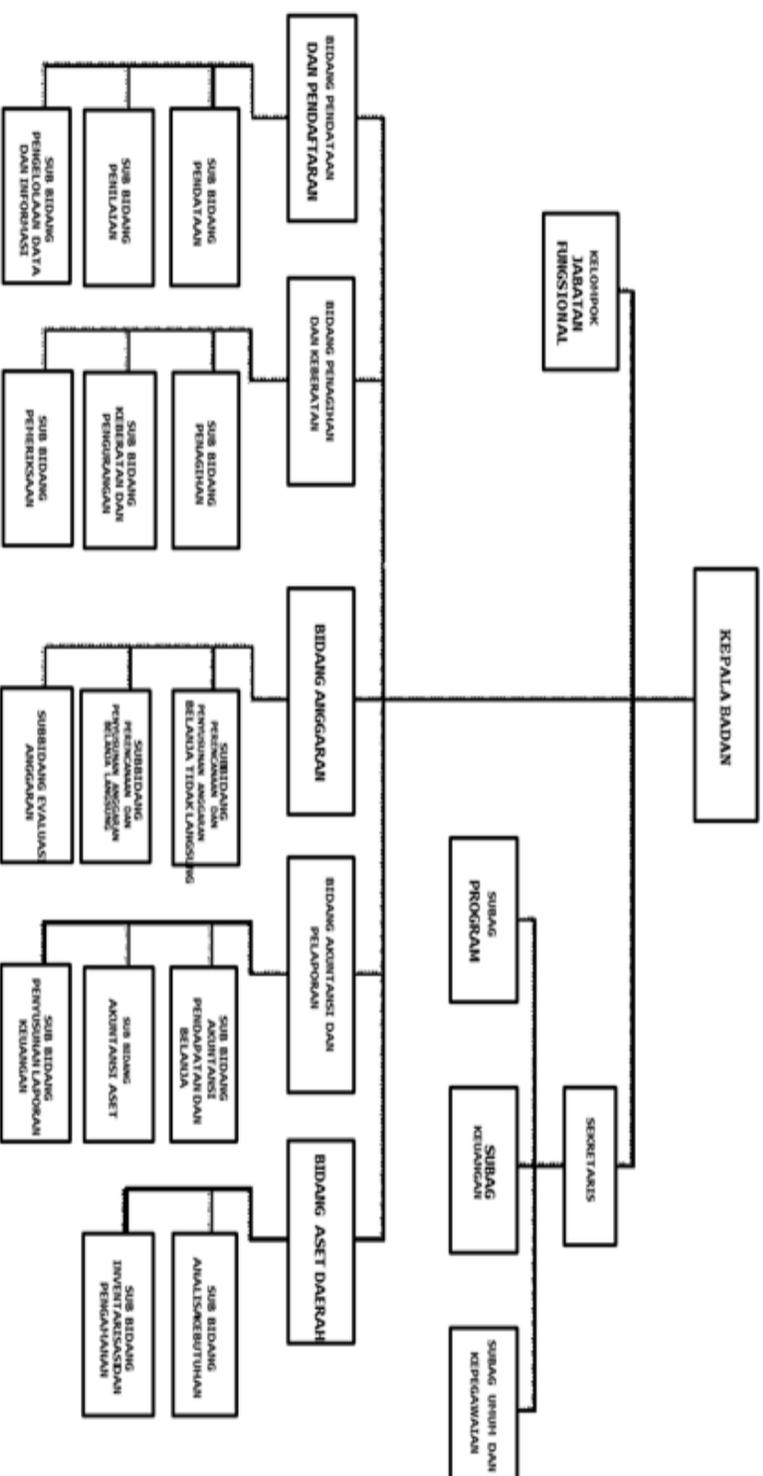
- Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;
- Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pajak.
- Masih rendahnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang baik.
- Kurangnya sumber daya manusia sehingga kurang maksimal dalam pencapaian target.
- Tingginya tuntutan pelayanan dari masyarakat.
- Belum meratanya pemahaman sistem keuangan yang baru.
- Masih rendahnya tingkat akurasi pelaporan pengelolaan barang daerah.

Sedangkan dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (*Opportunities*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

- Letak geografis Kabupaten Pangandaran yang strategis;
- Adanya produk-produk hukum tentang nilai pembayaran pajak.
- Banyaknya potensi pajak yang belum tergali di Kabupaten Pangandaran.
- Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Keuangan Daerah.
- Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
- Adanya Agenda Nasional untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.
- Adanya kegiatan pembinaan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- Adanya kemitraan dengan lembaga/ instansi terkait.



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN





### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi daerah, suatu pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih memperlihatkan kemandiriannya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai tonggak pelaksanaan otonomi daerah telah berdampak terhadap berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat, sebaliknya kewenangan tugas Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota mengalami peningkatan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya tugas bidang keuangan sebagai salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola APBD.

Dalam hal penyelenggaraan keuangan daerah, dengan telah ditetapkannya Paket Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) sebagai dasar petunjuk pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten / Kota dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu mendorong akuntabilitas publik menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, salah satu kunci yang paling penting adalah mengimplementasikan administrasi keuangan daerah yang meliputi anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan, pelaksanaan penatausahaan akuntansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara proporsional dan profesional sehingga mampu menjawab semua permasalahan mulai dari



aspek perencanaan, pelaksanaan yang meliputi alokasi dan distribusi sampai pada pelaporan keuangan sehingga menjamin akuntabilitas penyelenggaraan atas pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

### **3.1.1 PERMASALAHAN**

- a. Proses perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran belum optimal
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan pendapatan serta pengembangan investasi daerah belum optimal
- c. Besaran provisi dana bagi hasil hutan untuk Kabupaten Pangandaran belum optimal
- d. Bahan data penyusunan laporan akuntansi keuangan yang disusun oleh SOPD belum optimal
- e. Bahan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum tepat waktu
- f. Sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan belum memadai
- g. Koordinasi lintas sektoral baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat belum optimal
- h. Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP
- i. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD

### **3.1.2 IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL**

Identifikasi faktor internal bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknes*) hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi potensi kinerja dan permasalahannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

- a. Kekuatan (*Strength*)
  - 1) Adanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 2) Adanya Program Kerja Tahunan (PKT)
- b. Kelemahan (*Weaknes*)



- 1) Intensitas dan volume beban kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah cukup tinggi dibanding dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 2) Tersedianya sarana yang tidak memadai
- 3) Kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan belum memadai
- 4) Data base dan informasi belum memadai
- 5) Koordinasi belum optimal

### **3.1.3 IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL**

Identifikasi faktor eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*), bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

#### **a. Peluang (*Opportunities*)**

- 1) Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Keuangan Daerah
- 2) Motivasi kerja pegawai cukup tinggi
- 3) Adanya Agenda Nasional untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik.
- 4) Adanya kegiatan pembinaan bidang pengelolaan keuangan daerah
- 5) Adanya kemitraan dengan lembaga/ instansi terkait
- 6) Adanya kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat

#### **b. Ancaman (*Threats*)**

- 1) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
- 2) Tingginya tuntutan pelayanan dari masyarakat
- 3) Belum meratanya pemahaman sistem keuangan yang baru
- 4) Masih rendahnya tingkat akurasi pelaporan pengelolaan barang daerah.

### **3.1.4 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI**

Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas maka faktor-faktor penentu untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan proyeksi keberhasilan Badan



Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah dengan cara :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan untuk mendukung terwujudnya Pemerintahan Yang Baik.
2. Menerbitkan Laporan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi tingginya tuntutan pelayanan dari masyarakat.

### **3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Bupati Kabupaten Pangandaran terpilih periode Tahun 2016-2021, mempunyai Visi : **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**.

Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2016-2021 adalah:

1. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
2. Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan social yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa, dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif,



akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (Good Government).

### **3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT DAN DINAS/BADAN TERKAIT TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT**

Dari sisi pendapatan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara, pemerintah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dengan tidak memberatkan masyarakat. Dari sisi belanja, untuk meningkatkan efektivitas belanja Negara, dilakukan beberapa upaya, seperti :

1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), antara lain melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur;
2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaran pemerintah pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra K/L, RKP K/L, dan RKA K/L. Demikian juga di daerah, untuk RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD;
3. Menyusun alokasi belanja lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatan perekonomian domestik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggarnya;
5. Menyempurnakan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat dan akuntabel.

Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber terbesar struktur pendanaannya adalah berasal dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Transfer ke daerah tersebut berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Khusus untuk dana perimbangan, dari tahun ketahun terus ditingkatkan seiring dengan pelaksanaan azas desentralisasi urusan pemerintahan. Ada tiga bentuk dana



perimbangan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah merupakan sesuatu yang mutlak harus dibuat dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam merencanakan tata ruang wilayahnya ke depan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah masing-masing. Rencana Tata Ruang wilayah sedikitnya paling lama sepuluh tahun bisa ditinjau kembali. Hal ini untuk memberikan waktu yang cukup sekaligus mengantisipasi penyesuaian terhadap perkembangan jaman. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memang tidak secara langsung terkait atau bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, namun paling tidak akan mendapatkan dampak serta manfaatnya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah termasuk SKPD pemetik manfaat dari fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada. Hanya saja tetap bertanggungjawab dalam pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada tersebut terbatas yang menjadi tanggungjawabnya.

### **3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS**

Dari analisis permasalahan, hambatan dan faktor pendorong terhadap pelayanan SKPD, maka dapat diinventarisir beberapa isu-isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan SKPD dalam lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Penambahan wewenang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengembangan Obyek Pajak Daerah tanpa membebani masyarakat, hal ini dengan terbitnya Undang-undang PPn yang baru, sejak 1 April 2010 ada penghapusan terhadap beberapa obyek PPn;
3. Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang dan harga-harga melalui revisi Peraturan Daerah;
4. Optimalisasi pengelolaan Badan-badan Usaha Daerah sebagai sumber penghasil penerimaan pendapatan daerah;



5. Optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai penghasil penerimaan pendapatan daerah;
6. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pendapatan daerah dalam rangka efektifitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

**Tabel T-C .25.a  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran**

| No | Tujuan   | Indikator Tujuan                   | Target Kinerja Tujuan/Sasaran |      |      |      |      |      |      |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |                                    | 2020<br>(kondisi awal)        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2  | 3                                  | 6                             | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 1. | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Nilai SAKIP                        | 66,73                         | 68   | 70   | 72   | 74   | 76   | 78   |
|    |  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 69                            | 69   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   |



**Tabel T-C .25.b**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Pangandaran**

| No | Sasaran  | Indikator Sasaran                                       | Target Kinerja Tujuan/Sasaran |      |      |      |      |      |      |
|----|--|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |   | 2020<br>(kondisi awal)        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 4  | 5   | 6                             | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah             | Nilai LHE AKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah        | 66,73                         | 68   | 70   | 72   | 74   | 76   | 78   |
| 2  | Akuntabilitas dan Tarnsparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan | Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | 4,5                           | 5    | 5    | 5,5  | 5,5  | 6    | 6    |
|    |  | Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD        | 20                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
|    |  | Indeks Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah          | 4,5                           | 5    | 5    | 5,5  | 5,5  | 6    | 6    |
|    |  | Indeks Penyerapan Anggaran Daerah                       | 20                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
|    |  | Indeks Kondisi Keuangan Daerah                          | 5                             | 6    | 6    | 6,5  | 7    | 7    | 8    |
|    |  | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah              | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD                                       | Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai SAP | 70%                           | 70%  | 70%  | 75%  | 75%  | 80%  | 85%  |
|    |  | Peningkatan Sertifikasi Tanah BMD                       | 80%                           | 80%  | 85%  | 90%  | 100% | 100% | 100% |
|    |  | Peningkatan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan            | 70%                           | 70%  | 70%  | 75%  | 75%  | 80%  | 85%  |
| 4  | Meningkatnya Pajak Daerah  | Persentase peningkatan Pajak Daerah                     | 1%                            | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| <b>VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa</b> |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>MISI V : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel</b>          |   |   |   |
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)              | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.</li> <li>2. Peningkatan professionalism e aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran.</li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap prestasi kerja yang</li> </ol> |



**VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa**

**MISI V : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel**

| Tujuan | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|--------|---|--|---|
|        |   |  | terukur.  |
|        | 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat | 1. Peningkatan kualitas Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menukung sasaran pembangunan daerah | 1. Efektifitas pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen yang profesional..  |
|        | 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD                   | 1. Pengelolaan kebutuhan Sarana Prasarana dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.                                     | 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan administrasi BMD yang terintegasi.  |
|        | 4. Meningkatnya Pajak Daerah                                    | 1. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah<br>2. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan | 1. Sinergitas pemerintah Daerah dengan masyarakat dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.<br>2. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi. |



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Tujuan, dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam tabel T.C.27



Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pangandaran

| Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |    | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi           |
|------|---|---|--------|--|--------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---|----|--|------------------|
|      |   |   |        | 2021   |                    | 2022  |                 | 2023           |                 | 2024           |                 | 2025           |                 | 2026           |                 | Target         | Rp                   |   |    |  |                  |
|      |   |   |        | Target   | Rp                 | Target  | Rp              | Target         | Rp              | Target         | Rp              | Target         | Rp              | Target         | Rp              |                |                      |   |    |  |                  |
| 1    | 2   | 3   | 4      | 5  | 6                  | 7   | 8               | 9              | 10              | 11             | 12              | 13             | 14              | 15             | 16              | 17             | 18                   | 19  | 20 |  |                  |
|      | KEUANGAN  |   |        |  | 352.280.558.975,00 |   | 358.137.622.000 |                | 364.132.222.000 |                | 394.531.534.500 |                | 428.050.567.250 |                | 464.978.918.750 |                | 2.311.165.713.224,14 |   |    |  |                  |
| 1    | PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi      | %      | 90   |                    | 91  |                 | 92             |                 | 93             |                 | 94             |                 | 95             |                 | 95             |                      |   |    |  |                  |
|      |   |   |        | 96   |                    | 97  |                 | 98             |                 | 100            |                 | 100            |                 | 100            |                 | 95             |                      |   |    |  |                  |
|      |   |   |        | 23.016.500.000   |                    | 85  |                 | 24.942.860.000 |                 | 24.217.927.000 |                 | 24.595.100.000 |                 | 25.009.790.000 |                 | 25.465.744.000 |                      | 148.459.921.000   |    |  |                  |
|      |   |   |        |  |                    | 92  |                 | 95             |                 | 97             |                 | 97             |                 | 97             |                 | 97             |                      | 97  |    |  |                  |
| 1.1  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat      | %      | 90   |                    | 92  |                 | 95             |                 | 97             |                 | 98             |                 | 98             |                 | 98             |                      |   |    |  |                  |
|      |   |   |        | 90   |                    | 92  |                 | 95             |                 | 97             |                 | 98             |                 | 98             |                 | 98             |                      | 98  |    |  |                  |
|      |   |   |        | 125.000.000  |                    | 92  |                 | 163.400.000    |                 | 175.900.000    |                 | 189.650.000    |                 | 204.775.000    |                 | 221.412.000    |                      | 1.080.137.000   |    | SEKRETARIAT                            | Kab/Pangan daran |
|      |   | 90  |        | 92   |                    | 95  |                 | 97             |                 | 98             |                 | 98             |                 | 98             |                 |                |                      |   |    |  |                  |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode          | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                     | Satuan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan              |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Peringkat Daerah | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi      |                  |    |
|---------------|---|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|-------------|------------------|----|
|               |   |  |         | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Peringkat Daerah |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                |   |  |             | 2026             |    |
|               |   |  |         | Target   | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             |   |  |             | Target           | Rp |
| 1             | 2   | 3  | 4       | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15     | 16             | 17  | 18                                     | 19          | 20               |    |
|               |   | tepat waktu  |         |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |                  |    |
| 1.1.1         | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun  | Dokumen | 4  | 75.000.000     | 4      | 96.000.000     | 4      | 103.500.000    | 4      | 111.750.000    | 4      | 120.825.000    | 4      | 130.807.000    | 4   | 637.882.000                            | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |
| SEKR ETARI AT | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan | Dokumen | 4  | 50.000.000     | 4      | 67.400.000     | 4      | 72.400.000     | 4      | 77.900.000     | 4      | 83.950.000     | 4      | 90.605.000     | 4   | 442.255.000                            |             | Kab. Pangandaran |    |
| 1.2           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik                                       | %       | 80   | 20.230.000.000 | 82     | 20.241.000.000 | 85     | 20.247.500.000 | 90     | 20.254.650.000 | 99     | 20.262.515.000 | 99     | 20.271.166.000 | 99  | 121.506.831.000                        | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |
| 1.2.1         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan   | Orang   | 50   | 20.000.000.000 | 60     | 20.000.000.000 | 70     | 20.000.000.000 | 80     | 20.000.000.000 | 80     | 20.000.000.000 | 80     | 20.000.000.000 | 420   | 120.000.000.000                        | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |
| 1.2.3         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD  | Dokumen | 5  | 55.000.000     | 5      | 66.000.000     | 5      | 70.500.000     | 5      | 75.450.000     | 5      | 80.895.000     | 5      | 86.884.000     | 30  | 434.729.000                            | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |
| 1.2.5         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan                                | Laporan | 1  | 155.000.000    | 1      | 155.000.000    | 1      | 155.000.000    | 1      | 155.000.000    | 1      | 155.000.000    | 1      | 155.000.000    | 6   | 930.000.000                            | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |
| 1.2.7         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD        | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun                                      | Laporan | 3  | 10.000.000     | 3      | 10.000.000     | 3      | 11.000.000     | 3      | 12.100.000     | 3      | 13.310.000     | 3      | 14.641.000     | 18  | 71.051.000                             | SEKRETARIAT | Kab. Pangandaran |    |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |             |        |             |        |             |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|---|--|---------|---|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---|--|--------|
|       |   |  |         | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |               |        |               |   |  |        |
|       |   |  |         | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            |   |  |        |
| 1     | 2   | 3  | 4       | 5   | 6             | 7      | 8             | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16            | 17     | 18            | 19  | 20                                     |        |
| 1.2.8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran      | Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun        | Laporan | 1   | 10.000.000    | 1      | 10.000.000    | 1      | 11.000.000  | 1      | 12.100.000  | 1      | 13.310.000  | 1      | 14.641.000    | 6      | 71.051.000    | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.3   | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah          | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik          | %       | 70  | 63.000.000    | 74     | 63.000.000    | 78     | 66.100.000  | 82     | 70.610.000  | 86     | 75.571.000  | 90     | 81.026.000    | 90     | 419.309.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.3.6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola                           | Jenis   | 3   | 63.000.000    | 3      | 63.000.000    | 3      | 66.100.000  | 3      | 70.610.000  | 3      | 75.571.000  | 3      | 81.026.000    | 18     | 419.309.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.4   | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah              | %       | 5   | 71.500.000    | 5      | 84.800.000    | 5      | 86.800.000  | 5      | 88.800.000  | 5      | 90.800.000  | 5      | 92.800.000    | 5      | 515.500.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.4.7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                  | Laporan | 11  | 71.500.000    | 11     | 84.800.000    | 11     | 86.800.000  | 11     | 88.800.000  | 11     | 90.800.000  | 11     | 92.800.000    | 66     | 515.500.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.5   | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik               | %       | 90  | 220.000.000   | 93     | 254.800.000   | 95     | 161.300.000 | 97     | 173.950.000 | 99     | 187.865.000 | 99     | 203.171.000   | 99     | 1.201.086.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.5.2 | Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya              | Jumlah Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan            | Set     | 155   | 155.000.000   | 165    | 155.000.000   | 175    | 55.000.000  | 185    | 60.500.000  | 195    | 66.550.000  | 205    | 73.205.000    | 1080   | 565.255.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.5.4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian             | Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan | Laporan | 5   | 65.000.000    | 5      | 99.800.000    | 5      | 106.300.000 | 5      | 113.450.000 | 5      | 121.315.000 | 5      | 129.966.000   | 30     | 635.831.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |
| 1.6   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik                      | %       | 85  | 1.207.000.000 | 90     | 1.257.000.000 | 92     | 798.600.000 | 94     | 878.460.000 | 96     | 966.306.000 | 99     | 1.062.935.000 | 99     | 6.170.301.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran                       |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)     | Satuan  | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|---|--|---------|--|-------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|---|------------------|--|--------|
|       |   |  |         | 2021   |             | 2022  |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             | Target | Rp            |   |                  |  |        |
|       |   |  |         | Target   | Rp          | Target  | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          |        |               |   |                  |  |        |
| 1     | 2   | 3  | 4       | 5  | 6           | 7   | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17     | 18            | 19  | 20               |  |        |
| 1.6.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan   | Jenis   | 6  | 42.000.000  | 6   | 42.000.000  | 6      | 9.900.000   | 6      | 10.890.000  | 6      | 11.979.000  | 6      | 13.176.000  | 36     | 129.945.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.6.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor disediakan                            | Jenis   | 90   | 750.000.000 | 100   | 750.000.000 | 110    | 330.000.000 | 120    | 363.000.000 | 130    | 399.300.000 | 140    | 439.230.000 | 690    | 3.031.530.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.6.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                          | Jenis   | 5  | 80.000.000  | 5   | 80.000.000  | 5      | 55.000.000  | 5      | 60.500.000  | 5      | 66.550.000  | 5      | 73.205.000  | 30     | 415.255.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.6.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan           | Jenis   | 4  | 25.000.000  | 5   | 25.000.000  | 5      | 7.700.000   | 6      | 8.470.000   | 6      | 9.317.000   | 6      | 10.248.000  | 32     | 85.735.000    | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.6.9 | Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan               | Laporan | 100  | 310.000.000 | 120   | 360.000.000 | 130    | 396.000.000 | 140    | 435.600.000 | 150    | 479.160.000 | 160    | 527.076.000 | 800    | 2.507.836.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.7   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah          | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi                      | %       | 20   | 870.000.000 | 25  | 990.189.000 | 27     | 621.708.000 | 30     | 683.879.000 | 33     | 752.267.000 | 36     | 827.493.000 | 36     | 4.745.536.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.7.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Unit    | 0  | 0           | 0   | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | -             | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.7.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan               | Unit    | 0  | 0           | 0   | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | -             | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.7.5 | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan   | Jenis   | 10   | 280.000.000 | 15  | 280.000.000 | 17     | 110.000.000 | 20     | 121.000.000 | 23     | 133.100.000 | 26     | 146.410.000 | 111    | 1.070.510.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.7.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang  | Unit    | 17   | 370.000.000 | 25  | 370.000.000 | 30     | 137.500.000 | 40     | 151.250.000 | 50     | 166.375.000 | 55     | 183.012.000 | 217    | 1.378.137.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Satuan   | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|--|--|----------|--|----------------|---|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------------|--|--------|
|       |  |  |          | 2021   |                | 2022  |                | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target | Rp            |   |                  |  |        |
|       |  |  |          | Target   | Rp             | Target  | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |        |               |   |                  |  |        |
| 1     | 2  | 3  | 4        | 5  | 6              | 7   | 8              | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16            | 17     | 18            | 19  | 20               |  |        |
|       |  | diadakan   |          |  |                |   |                |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |   |                  |  |        |
| 1.7.9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan   | Unit     | 3  | 220.000.000    | 3   | 340.189.000    | 3      | 374.208.000   | 3      | 411.629.000   | 3      | 452.792.000   | 3      | 498.071.000   | 18     | 2.296.889.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.8   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan  | %        | 85   | 880.000.000    | 87  | 1.089.200.000  | 90     | 1.180.600.000 | 95     | 1.287.240.000 | 99     | 1.405.594.000 | 99     | 1.535.233.000 | 99     | 7.378.367.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan   | Buah     | 1080   | 10.000.000     | 1100  | 10.000.000     | 1200   | 4.400.000     | 1300   | 4.840.000     | 1400   | 5.324.000     | 1500   | 5.856.000     | 7580   | 40.420.000    | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.8.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan   | Rekening | 4  | 450.000.000    | 4   | 550.000.000    | 4      | 605.000.000   | 4      | 665.500.000   | 4      | 732.050.000   | 4      | 805.255.000   | 24     | 3.807.805.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| .     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan  | Orang    | 11   | 420.000.000,00 | 12  | 529.200.000,00 | 12     | 571.200.000   | 12     | 617.400.000   | 12     | 668.220.000   | 12     | 724.122.000   | 71     | 3.530.142.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.9   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi  | %        | 90   | 562.000.000    | 92  | 799.471.000    | 94     | 879.419.000   | 96     | 967.361.000   | 97     | 1.064.097.000 | 98     | 1.170.506.000 | 98     | 5.442.854.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.9.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Unit     | 60   | 220.000.000    | 65  | 317.471.000    | 70     | 349.219.000   | 75     | 384.141.000   | 80     | 422.555.000   | 85     | 464.810.000   | 435    | 2.158.196.000 | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.9.5 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang dikedala   | Jenis    | 10   | 22.000.000     | 15  | 22.000.000     | 17     | 24.200.000    | 20     | 26.620.000    | 23     | 29.282.000    | 26     | 32.210.000    | 111    | 156.312.000   | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 1.9.6 | Pemeliharaan   | Jumlah Peralatan dan   | Jenis    | 7  | 160.000.000    | 7   | 260.000.000    | 7      |               | 7      |               | 7      |               | 7      |               | 42     |               | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                | Satuan  | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Berangkat Daerah |                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                  |        |                  |        |                    |        |                    |        |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Berangkat Daerah |                  | Unit Berangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|--|---|---------|--|--------------------|---|--------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|---|------------------|--|--------|
|       |  |   |         | 2021   |                    | 2022  |                    | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                    | 2026   |                    | Target | Rp                   |   |                  |  |        |
|       |  |   |         | Target   | Rp                 | Target  | Rp                 | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp                 | Target | Rp                 |        |                      |   |                  |  |        |
| 1     | 2  | 3   | 4       | 5  | 6                  | 7   | 8                  | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14                 | 15     | 16                 | 17     | 18                   | 19  | 20               |  |        |
|       | Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Mesin Lainnya Yang dikelola   |         |  |                    |   |                    |        | 285.000.000      |        | 314.500.000      |        | 346.050.000        |        | 380.555.000        |        | 1.747.326.000        |   | daerah           |  |        |
| 1.9.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi   | Unit    | 7  | 160.000.000        | 7   | 200.000.000        | 7      | 220.000.000      | 7      | 242.000.000      | 7      | 266.200.000        | 7      | 292.820.000        | 42     | 1.381.020.000        | SEKRETARIAT   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2     | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan | %       | 80%  | 307.042.780.550,00 | 85%   | 309.718.970.000,00 | 90%    | 318.037.404.000  | 100%   | 346.943.845.500  | 100%   | 378.834.709.750,00 | 100%   | 414.059.070.000,00 | 100%   | 2.074.773.613.800,14 | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1   | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   | Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA  | %       | 100%   | 6.042.614.550,00   | 100%  | 6.067.720.000,00   | 100%   | 6.371.103.500,00 | 100%   | 6.689.657.000,00 | 100%   | 6.636.334.000,00   | 100%   | 6.938.021.000,00   | 100%   | 38.745.450.050,00    | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                       | Jumlah Dokumen KUA,PPAS   | Dokumen | 2  | 465.590.000,00     | 2   | 465.590.000,00     | 2      | 488.869.500,00   | 2      | 513.312.000,00   | 2      | 538.978.000,00     | 2      | 565.927.000,00     | 2      | 3.038.266.500        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Jumlah Dokumen KUPA, PPASP  | Dokumen | 2  | 466.060.000,00     | 2   | 466.060.000,00     | 2      | 489.363.000,00   | 2      | 513.831.000,00   | 2      | 539.522.000,00     | 2      | 566.498.000,00     | 2      | 3.041.334.000        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.3 | Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                           | Jumlah RKA SKPD yang di asistensi   | SKPD    | 35   | 378.016.000,00     | 36  | 378.016.000,00     | 35     | 396.916.000,00   | 36     | 416.762.000,00   | 36     | 437.600.000,00     | 36     | 459.480.000,00     | 36     | 2.466.790.000        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.4 | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                 | Jumlah RKA SKPD yang di asistensi   | SKPD    | 35   | 388.990.000,00     | 36  | 388.990.000,00     | 35     | 408.439.500,00   | 36     | 428.861.000,00   | 36     | 450.304.000,00     | 36     | 472.819.000,00     | 36     | 2.538.403.500        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD               | Jumlah DPA SKPD yang di asistensi   | SKPD    | 35   | 389.590.000,00     | 36  | 389.590.000,00     | 35     | 409.069.500,00   | 36     | 429.522.000,00   | 36     | 450.999.000,00     | 36     | 473.549.000,00     | 36     | 2.542.319.500        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.1.6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD     | Jumlah DPA SKPD yang di asistensi   | SKPD    | 35   | 508.228.000,00     | 36  | 508.228.000,00     | 35     | 533.639.000,00   | 36     | 560.321.000,00   | 36     | 588.337.000,00     | 36     | 617.754.000,00     | 36     | 3.316.507.000        | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah | Rp            | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi            |
|--------|---|--|---------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|---------------|--|-------------------|
|        |   |  |         | 2021  |                  | 2022   |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  |   |               |  |                   |
|        |   |  |         | Target  | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               |   |               |  |                   |
| 1      |   |  |         | 2   | 798.308.000,00   | 2      | 798.308.000,00   | 2      | 838.223.000,00   | 2      | 880.134.000,00   | 2      | 924.141.000,00   | 2      | 970.348.000,00   | 2   | 5.209.462.000 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |
|        |   |  |         | 2   |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2   |               |  |                   |
| 2.1.7  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD           | Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun  | Dokumen | 2   | 798.308.000,00   | 2      | 798.308.000,00   | 2      | 838.223.000,00   | 2      | 880.134.000,00   | 2      | 924.141.000,00   | 2      | 970.348.000,00   | 2   | 5.209.462.000 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |
|        |   |  |         | 2   |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2   |               |  |                   |
| 2.1.8  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Raperbup dan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun  | Dokumen | 12  | 1.241.864.000,00 | 12     | 1.241.864.000,00 | 12     | 1.303.957.000,00 | 12     | 1.369.155.000,00 | 12     | 1.437.612.000,00 | 12     | 1.509.493.000,00 | 12  | 8.103.945.000 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |
|        |   |  |         | 2   |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2   |               |  |                   |
| 2.1.9  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran  | Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah Bansos, Perbup BTT, Perbup Penganggaran melewatkan Tahun Anggaran) | Dokumen | 4   | 502.142.950,00   | 36     | 527.250.000,00   | 35     | 553.612.000,00   | 36     | 581.293.000,00   | 36     | 610.357.000,00   | 36     | 640.875.000,00   | 36  | 3.415.529.950 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |
|        |   |  |         | 1   |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1   |               |  |                   |
| 2.1.10 | Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pendapatan   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan  | Dokumen | 25  | 272.014.800,00   | 1      | 272.014.000,00   | 1      | 285.615.000,00   | 1      | 299.896.000,00   | 1      | 212.436.000      | 1      | 213.325.000      | 1   | 1.555.300.800 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |
| 2.1.11 | Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan  | dokumen | 29  | 272.014.800,00   | 93     | 272.014.000,00   | 93     | 285.615.000,00   | 93     | 299.896.000,00   | 93     | 243.036.000      | 93     | 243.925.000      | 93  | 1.616.500.800 | BIDANG ANGGARAN                        | Kab. Pangan daran |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)          | Satuan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan              |                |        |                |        |                |        |                |        |               |        |               |        |                |   |                  |  |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---|------------------|--|--|--|--------|
|        |   |   |         | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  |  |  |  |        |
|        |   |   |         | Target   | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp             | Target  | Rp               |  |  |  |        |
| 1      | 2   | 3   | 4       | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14            | 15     | 16            | 17     | 18             | 19  | 20               |  |  |  |        |
| 2.1.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Penbiayaan  | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan   | dokumen | 20   | 238.916.000,00 | 36     | 238.916.000,00 | 35     | 250.861.000,00 | 36     | 263.404.000,00 | 36     | 101.506.000   | 36     | 102.014.000   | 36     | 1.135.617.000  | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.1.13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemintah Kabupaten/Kota                               | Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten | Orang   | 35   | 120.880.000,00 | 72     | 120.880.000,00 | 72     | 126.924.000,00 | 72     | 133.270.000,00 | 72     | 101.506.000   | 72     | 102.014.000   | 72     | 705.474.000    | BIDANG ANGGARAN   | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.2    | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perdebataraan Daerah                            | Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang terhd dan sesuai ketentuan  | %       | 65   | 2.203.900.000  | 75     | 2.203.900.000  | 85     | 2.396.380.000  | 90     | 2.509.814.500  | 93     | 2.601.348.750 | 95     | 2.711.729.000 | 98     | 14.627.072.250 | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.2.1  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah Dokumen yang Disusun   | Dokumen | 12   | 530.000.000    | 12     | 530.000.000    | 12     | 535.300.000    | 12     | 564.741.500    | 12     | 564.741.000   | 12     | 592.978.000   | 12     | 3.317.760.500  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.2.3  | Penyiajan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertbitan Anggaran Kas dan SPD            | Jumlah SKPD yang ditribtkan SPD dan Anggaran Kas nya                                | SKPD    | 35   | 150.000.000    | 35     | 150.000.000    | 35     | 157.500.000    | 35     | 165.375.000    | 35     | 173.643.750   | 35     | 182.325.000   | 35     | 978.843.750    | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.2.4  | Penatausahaan Penbiayaan Daerah   | Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung   | SKPD    | 35   | 175.000.000    | 35     | 175.000.000    | 35     | 235.368.000    | 35     | 241.916.000    | 35     | 250.167.000   | 35     | 253.082.000   | 35     | 1.330.533.000  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |
| 2.2.5  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Pengajian Pencairan Hibah Bansos, Banku                              | Dokumen | 8  | 381.800.000    | 8      | 381.800.000    | 8      | 400.890.000    | 8      | 420.934.500    | 8      | 441.981.000   | 8      | 464.080.000   | 8      | 2.491.485.500  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |  |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Peringkat Daerah | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                         |                  |
|--------|---|--|---------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|--|--------------------------------|------------------|
|        |   |  |         | 2021  |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |   |  |                                |                  |
|        |   |  |         | Target  | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          |   |  |                                |                  |
| 1      | Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan  | SKPD    | 35  |             | 35     | 0           | 35     | 0           | 35     | 0           | 35     | 0           | 35     | 0           | 35  |  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN | Kab. Pangandaran |
| 2.2.6  | Koordinasi, Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   | Jumlah sistem Transaksi Non Tunai  | Sistem  | 1   | 280.000.000 | 1      | 280.000.000 | 1      | 294.000.000 | 1      | 308.700.000 | 1      | 324.135.000 | 1      | 340.341.750 | 1   | 1.827.176.750                          | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN | Kab. Pangandaran |
| 2.2.7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Permotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji PNS, Laporan PFK, Rekonsiliasi Gaji, Rekonsiliasi PFK, Laporan Realisasi Gaji PNS | Dokumen | 12  | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 210.000.000 | 12     | 220.500.000 | 12     | 231.525.000 | 12     | 243.101.250 | 12  | 1.305.126.250                          | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN | Kab. Pangandaran |
| 2.2.9  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan SP2D dengan Instansi Terkait  | Jumlah SP2D yang Diterbitkan   | SP2D    | 4700  | 202.100.000 | 4700   | 202.100.000 | 4700   | 264.072.000 | 4700   | 273.435.000 | 4700   | 285.233.000 | 4700   | 289.402.000 | 4700  | 1.516.342.000                          | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN | Kab. Pangandaran |
| 2.2.11 | Pembinaan Perusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Perusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten  | Orang   | 85  | 285.000.000 | 85     | 285.000.000 | 85     | 299.250.000 | 85     | 314.212.500 | 85     | 329.923.000 | 85     | 346.419.000 | 85  | 1.859.804.500                          | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN | Kab. Pangandaran |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Satuan  | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|--|---|---------|--|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---|------------------|--|--------|
|       |  |   |         | 2021   |               | 2022  |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target | Rp             |   |                  |  |        |
|       |  |   |         | Target   | Rp            | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |        |                |   |                  |  |        |
| 1     | 2  | 3   | 4       | 5  | 6             | 7   | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16            | 17     | 18             | 19  | 20               |  |        |
| 2.3   | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | Persentase PD yang tepat waktu dalam laporan keuangan sesuai SAP(Aktual)  | %       | 70   | 2.681.430.250 | 75  | 2.695.680.250 | 80     | 2.736.347.500 | 85     | 2.861.547.000 | 90     | 2.880.904.000 | 95     | 3.009.857.000 | 100    | 16.865.766.000 | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.3.1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah   | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah  | SKPD    | 9  | 172.000.000   | 9   | 172.000.000   | 9      | 175.440.000   | 9      | 184.212.000   | 9      | 195.264.000   | 9      | 199.170.000   | 9      | 1.098.086.000  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.3.2 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban                    | Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd  | SKPD    | 35   | 250.319.250   | 35  | 250.319.250   | 35     | 243.141.000   | 35     | 255.298.000   | 35     | 270.615.000   | 35     | 282.780.000   | 35     | 1.552.472.500  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.3.3 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                             | Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun                            | Dokumen | 1  | 350.000.000   | 1   | 350.000.000   | 1      | 353.500.000   | 1      | 371.175.000   | 1      | 393.445.000   | 1      | 405.248.000   | 1      | 2.223.368.000  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.3.4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun                                      | Dokumen | 1  | 970.331.000   | 1   | 970.331.000   | 1      | 989.737.000   | 1      | 1.021.003.000 | 1      | 1.082.263.000 | 1      | 1.136.376.000 | 1      | 6.170.041.000  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
| 2.3.5 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provisi dan Rancangan Peraturan | Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban | Dokumen | 1  | 653.780.000   | 1   | 653.780.000   | 1      | 660.317.000   | 1      | 699.936.000   | 1      | 592.898.000   | 1      | 622.543.000   | 1      | 3.883.254.000  | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                           | Satuan   | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|--|--|----------|--|-----------------|---|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---|-------------------|--|--------|
|        |  |  |          | 2021   |                 | 2022  |                 | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Target | Rp                |   |                   |  |        |
|        |  |  |          | Target   | Rp              | Target  | Rp              | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               |        |                   |   |                   |  |        |
| 1      | 2  | 3  | 4        | 5  | 6               | 7   | 8               | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15     | 16               | 17     | 18                | 19  | 20                |  |        |
|        | Kepala Daerah tentang Pengalangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota         | Pelaksanaan APBD yang disusun  |          |  |                 |   |                 |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |   |                   |  |        |
| 2.3.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota              | Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten | Orang    | 85   | 285.000.000     | 85  | 299.250.000     | 85     | 314.212.500      | 85     | 329.923.000      | 85     | 346.419.000      | 85     | 363.740.000      | 85     | 1.938.544.500     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |
| 2.4    | Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Daerah  | Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan   | %        | 80   | 295.000.000.000 | 85  | 297.500.000.000 | 87     | 306.301.217.000  | 90     | 334.643.401.000  | 93     | 366.468.084.000  | 95     | 401.143.822.000  | 98     | 2.001.056.524.000 | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |
| 2.4.8  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   | Jumlah ajuan pencairan dari 93 kabupaten/provinsi  | Proposal | 93   | 250.000.000.000 | 93  | 250.000.000.000 | 93     | 275.000.000.000  | 93     | 302.500.000.000  | 93     | 332.750.000.000  | 93     | 366.025.000.000  | 558    | 1.776.275.000.000 | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |
| 2.4.9  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak  | Penyediaan Dana Darurat  | Tahun    | 1  | 5.000.000.000   | 1   | 7.500.000.000   | 1      | 7.500.000.000,00 | 1      | 7.500.000.000,00 | 1      | 7.500.000.000,00 | 1      | 7.500.000.000,00 | 1      | 42.500.000.000    | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |
| 2.4.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota   | Jumlah ajuan pencairan dari 93 desa  | Proposal | 93   | 40.000.000.000  | 93  | 40.000.000.000  | 93     | 23.801.217.000   | 93     | 24.643.401.000   | 93     | 26.218.084.000   | 93     | 27.618.822.000   | 558    | 182.281.524.000   | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |
| 2.5    | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik                                    | Sistem   | 100  | 1.114.835.750   | 100   | 1.251.669.750   | 100    | 232.356.000      | 100    | 239.426.000      | 100    | 248.039.000      | 100    | 255.641.000      | 100    | 3.478.801.500     | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan              |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Peringkat Daerah | Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi      |        |    |
|-------|---|--|----------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|-------------|--------|----|
|       |   |  |          | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Peringkat Daerah |                | 2021   |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                |   |  |             | 2026   |    |
|       |   |  |          | Target   | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             |   |  |             | Target | Rp |
| 1     | 2   | 3  | 4        | 5  | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15     | 16             | 17  | 18                                     | 19          | 20     |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 12 |
| 2.5.1 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                  | Jumlah Laporan/LKT yang Disusun  | Laporan  | 4  | 136.834.000    | 4      | 136.834.000    | 4      | 97.224.000     | 4      | 100.598.000    | 4      | 104.553.000    | 4      | 108.041.000    | 4   | 684.084.000                            | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 12 |
| 2.5.2 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah                                | Aplikasi | 1  | 1.114.835.750  | 1      | 1.114.835.750  | 1      | 135.132.000    | 1      | 138.828.000    | 1      | 143.486.000    | 1      | 147.600.000    | 1   | 2.794.171.500                          | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 1  |
| 3     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Persentase pengelolaan BMD yang terbit dan akumabel oleh Perangkat Daerah  | %        | 85%  | 13.711.337.424 | 90%    | 13.826.606.000 | 95%    | 13.998.262.000 | 100%   | 14.705.242.000 | 100%   | 15.475.659.000 | 100%   | 16.215.072.000 | 100%  | 87.932.178.424                         | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 1  |
| 3.1.3 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah     | Dokumen  | 1  | 10.407.246.000 | 1      | 10.407.246.000 | 1      | 10.927.608.000 | 1      | 11.473.988.000 | 1      | 12.047.688.000 | 1      | 12.650.072.000 | 6   | 67.913.848.000                         | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 1  |
| 3.1.4 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                    | Penyusunan Perda   | Dokumen  | 1  | 59.416.000     | 1      | 59.416.000     | 1      | 50.000.000     | 1      | 52.500.000     | 1      | 52.500.000     | 1      | 80.000.000     | 1   | 353.832.000                            | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 1  |
| 3.1.5 | Penertasan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Aset  | Laporan  | 1  | 169.499.910    | 1      | 169.499.000    | 1      | 90.000.000     | 1      | 94.500.000     | 1      | 94.500.000     | 1      | 120.000.000    | 1   | 737.998.910                            | Kab. Pangan | dar    |    |
|       |   |  |          |  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |   |  |             |        | 1  |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                 | Satuan           | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|--|--|------------------|--|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---|------------------|--|--------|
|        |  |  |                  | 2021   |               | 2022  |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target | Rp             |   |                  |  |        |
|        |  |  |                  | Target   | Rp            | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |        |                |   |                  |  |        |
| 1      | 2  | 3  | 4                | 5  | 6             | 7   | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16            | 17     | 18             | 19  | 20               |  |        |
| 3.1.6  | Inventarisasi Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi   | Laporan          | 3  | 814.728.178   | 1   | 930.000.000   | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 3      | 1.744.728.178  | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 3.1.7  | Pengamanan Barang Milik Daerah   | Jumlah kasus PT-TGR Yang ditangani   | Kasus            | 8  | 529.164.970   | 8   | 529.164.000   | 8      | 995.654.000   | 8      | 1.054.691.000 | 8      | 1.059.255.000 | 8      | 1.080.000.000 | 8      | 5.247.928.970  | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
|        |  |  |                  | 140  |               | 160   |               | 180    |               | 198    |               | 209    |               | 216    |               | 1103   |                |   |                  |  |        |
| 3.1.11 | Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran | Unit             | 10   | 1.198.494.516 | 15  | 1.198.494.000 | 15     | 1.200.000.000 | 15     | 1.264.563.000 | 15     | 1.400.000.000 | 15     | 1.420.000.000 | 85     | 7.681.551.516  | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
|        |  |  |                  | 1  |               | 1   |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |                |   |                  |  |        |
| 3.1.12 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                         | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD   | Perangkat Daerah | 35   | 228.680.000   | 35  | 228.680.000   | 35     | 435.000.000   | 35     | 450.000.000   | 35     | 450.000.000   | 35     | 485.000.000   | 35     | 2.277.360.000  | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 3.1.13 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   | Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update   | Laporan          | 1  | 154.107.850   | 1   | 154.107.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 105.000.000   | 1      | 121.716.000   | 1      | 130.000.000   | 1      | 764.930.850    | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 3.1.14 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek   | Orang            | 35   | 150.000.000   | 35  | 150.000.000   | 35     | 200.000.000   | 35     | 210.000.000   | 35     | 250.000.000   | 35     | 250.000.000   | 35     | 1.210.000.000  | BIDANG ASET   | Kab. Pangandaran |  |        |
| 4      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah   | %                | 40   | 8.509.941.001 | 50  | 9.649.186.000 | 60     | 7.878.629.000 | 70     | 8.287.347.000 | 80     | 8.730.408.500 | 90     | 9.239.032.750 | 90     | 51.676.047.901 | BPKD  | Kab. Pangandaran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Satuan      | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------|---|---|-------------|--|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---|-------------------|--|--------|
|       |   |   |             | Target   | Rp            | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |                | Target  | Rp                |  |        |
|       |   |   |             |  |               | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp             |   |                   |  |        |
| 1     | 2   | 3   | 4           | 5  | 6             | 7   | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16            | 17     | 18             | 19  | 20                |  |        |
| 4.1   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya Per tahun<br>Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya per tahun | %           | 10   | 8.509.941.001 | 10  | 9.649.186.000 | 10     | 7.878.629.000 | 10     | 8.287.347.000 | 10     | 8.730.408.500 | 10     | 9.239.032.750 | 10     | 51.676.047.901 | BKPD  | Kab.Pangan daran  |  |        |
|       |   |   |             | 10   |               | 10  |               | 10     |               | 10     |               | 10     |               | 10     |               | 10     |                |   |                   |  |        |
| 4.1.1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah  | Jumlah Aplikasi Yang Dikelola   | Aplikasi    | 1  | 689.402.800   | 1   | 689.402.000   | 1      | 723.872.000   | 1      | 760.066.000   | 1      | 798.069.000   | 1      | 837.973.000   | 1      | 4.498.784.800  | BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN                            | Kab.Pangan daran  |  |        |
|       |   |   |             | 465000   |               | 470000  |               | 475000 |               | 480000 |               | 480000 |               | 480000 |               |        |                |   |                   |  |        |
|       |   |   |             | Jumlah SPT yang didistribusikan                            |               | Jumlah DHKP yang didistribusikan              |               | 70     |               | 70     |               | 70     |               | 70     |               | 70     |                |   |                   | 70                                     |        |
| 4.1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah dokumen hasil analisa  | Aplikasi    | 3  | 2.020.000.000 | 1   | 2.020.000.000 | 1      | 204.793.000   | 2      | 209.793.000   | 2      | 224.793.000   | 2      | 290.793.000   | 2      | 4.970.172.000  | BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN                            | Kab. Pangan daran |  |        |
| 4.1.3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | Wajib Pajak | 150  | 240.000.000   | 250   | 240.000.000   | 350    | 232.000.000   | 450    | 264.600.000   | 500    | 277.830.000   | 550    | 291.721.500   | 650    | 1.566.151.500  | BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN                            | Kab. Pangan daran |  |        |
| 4.1.4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                        | Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran.   | Unit        | 50   | 399.999.866   | 20  | 400.000.000   | 20     | 420.000.000   | 20     | 441.000.000   | 20     | 463.050.000   | 20     | 486.202.500   | 110    | 2.610.252.366  | BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN                              | Kab. Pangan daran |  |        |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                           |                   |
|-------|---|--|-------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
|       |   |  |             | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |   |  |                                  |                   |
|       |   |  |             | Target  | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |   |  |                                  |                   |
| 1     | 2   | 3  | 4           | 5   | 6             | 7      | 8             | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16            | 17  | 18                                     | 19                               | 20                |
|       |   | Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran.                         | Kali        | 12  |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12  |  |                                  |                   |
|       |   | aplikasi yang di update  | Aplikasi    | 1   |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1   |  |                                  |                   |
| 4.1.5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan                    | Dokumen     | 1   | 451.000.000   | 1      | 451.000.000   | 1      | 155.000.000   | 1      | 160.000.000   | 1      | 165.000.000   | 1      | 185.000.000   | 4   | 1.567.000.000                          | BIDANG PENDATIAN DAN PENDAFTARAN | Kab. Pangan daran |
| 4.1.6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2                            | Objek Pajak | 85.000  | 3.160.000.000 | 20.000 | 3.160.000.000 | 20.000 | 3.318.000.000 | 20.000 | 3.483.900.000 | 20.000 | 3.658.095.000 | 20.000 | 3.840.999.750 | 100.000   | 20.620.994.750                         | BIDANG PENDATIAN DAN PENDAFTARAN | Kab. Pangan daran |
| 4.1.7 | Pemilihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan                    | Dokumen     | 486   | 364.000.000   | 486    | 364.000.000   | 486    | 382.200.000   | 486    | 401.310.000   | 486    | 421.375.500   | 486    | 442.444.000   | 2916  | 2.375.329.500                          | BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN   | Kab. Pangan daran |
| 4.1.8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Jumlah Objek Pajak Yang Termini  | Objek Pajak | 7000  | 200.425.150   | 7000   | 200.425.000   | 7000   | 210.446.000   | 7000   | 220.968.000   | 7000   | 232.017.000   | 7000   | 243.618.000   | 7000  | 0                                      | BIDANG PENDATIAN DAN PENDAFTARAN | Kab. Pangan daran |
| 4.1.9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Jumlah Objek Pajak   | Objek Pajak | 5000  | 354.419.085   | 6000   | 354.419.000   | 6000   | 372.140.000   | 7000   | 390.747.000   | 8000   | 410.284.000   | 8000   | 430.798.000   | 8000  | 2.312.807.085                          | BIDANG PENDATIAN DAN PENDAFTARAN | Kab. Pangan daran |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

| Kode   | Program dan Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan      | Kondisi Kinerja pada awal periode renstra Perangkat Daerah |             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|--|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------------|--|--------|
|        |  |  |             | 2021   |             | 2022  |             | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target | Rp            |   |                  |  |        |
|        |  |  |             | Target   | Rp          | Target  | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |        |               |   |                  |  |        |
| 1      |  |  |             | Target   | Rp          | Target  | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |   |                  |  |        |
| 4.1.10 | Peningkatan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring                                       | Objek Pajak | 983  | 196.962.900 | 1500  | 196.962.000 | 1700   | 206.811.000   | 2000   | 217.151.000   | 2300   | 228.009.000   | 3000   | 239.409.000   | 3000   | 1.285.304.900 | BIDANG PENDATIAAN DAN PENDAFTARAN                           | Kab. Pangandaran |  |        |
|        |  | Jumlah Dokumen Pengagihan Pajak Daerah                                     | Dokumen     | 4200   |             | 4200  |             | 4200   |               | 4200   |               | 4200   |               | 4200   |               | 4200   |               |   |                  |  |        |
| 4.1.11 | Pengagihan Pajak Daerah                                | Jumlah laporan realisasi PBB-22  | Laporan     | 12   | 668.165.000 | 12  | 987.787.000 | 12     | 1.037.176.000 | 12     | 1.089.035.000 | 12     | 1.143.486.000 | 12     | 1.200.661.000 | 12     | 6.126.310.000 | BIDANG PEMAGIHAN DAN KEBERATAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
|        |  | Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah | Laporan     | 93   |             | 93  |             | 93     |               | 93     |               | 93     |               | 93     |               | 93     |               |   |                  |  |        |
|        |  | Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mursi Objek Pajak | Dokumen     | 345  |             | 345   | 151.969.000 | 345    | 160.969.000   | 345    | 170.969.000   | 345    | 189.000.000   | 345    | 200.000.000   | 345    | 1.024.876.000 | BIDANG PEMAGIHAN DAN KEBERATAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |
|        |  | Jumlah reklame yang diterbitkan  | Reklame     | 10   |             | 10  |             | 10     |               | 10     |               | 10     |               | 10     |               | 10     |               |   |                  |  |        |
| 4.1.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa                                   | Wajib Pajak | 60   | 303.000.000 | 60  | 433.222.000 | 60     | 435.222.000   | 60     | 477.808.000   | 60     | 519.400.000   | 60     | 549.413.000   | 60     | 2.718.065.000 | BIDANG PEMAGIHAN DAN KEBERATAN                              | Kab. Pangandaran |  |        |



## BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja BPKD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel T.C.28a dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel T.C.28b berikut:

Tabel T.C.28a

Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKD Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Indikator  | Satuan    | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|-----------|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|
|     |  |           | 2020                                    | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)                                     | (5)                         | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                                     |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai LHE | 66,73                                   | 68                          | 70   | 72   | 74   | 76   | 78   | 78                                       |
| 2.  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                   | Indeks    | 69                                      | 69                          | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 75                                       |



Tabel T.C.28b

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah BPKD Kabupaten Pangandaran  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator  | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|----------------|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|
|    |  |                | 2020                                    | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1  | 2  | 3              | 4                                       | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                                       |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai LHE AKIP | 66,73                                   | 68                          | 70   | 72   | 74   | 76   | 78   | 78                                       |
| 2  | Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran               | Indeks         | 4,5                                     | 5                           | 5    | 5,5  | 5,5  | 6    | 6    | 6  |
| 3  | Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD                     | Indeks         | 20                                      | 20                          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                       |
| 4  | Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Indeks         | 4,5                                     | 5                           | 5    | 5,5  | 5,5  | 6    | 6    | 6  |
| 5  | Indeks Penyerapan Anggaran Daerah                                    | Indeks         | 20                                      | 20                          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                       |
| 6  | Indeks Kondisi Keuangan Daerah                                       | Indeks         | 5                                       | 6                           | 6    | 6,5  | 7    | 7    | 8    | 8  |
| 7  | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah                           | Opini BPK      | WTP                                     | WTP                         | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP                                      |
| 8  | Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai SAP              | %              | 70%                                     | 70%                         | 70%  | 75%  | 75%  | 80%  | 85%  | 85%                                      |
| 9  | Peningkatan Sertifikasi Tanah BMD                                    | %              | 80%                                     | 80%                         | 85%  | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 10 | Peningkatan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan                         | %              | 70%                                     | 70%                         | 70%  | 75%  | 75%  | 80%  | 85%  | 85%                                      |
| 11 | Persentase peningkatan Pajak Daerah                                  | %              | 1%                                      | 1%                          | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 1%                                       |



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ini memuat arahan perencanaan teknis strategi untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah khususnya dalam bidang Administrasi Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan landasan untuk program-program pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan dari Tahun 2021 – 2026, merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu komitmen dan konsistensi dari segenap unsur organisasi sangat menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan mewujudkan visi dan misi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta partisipasi aktif dari seluruh aparat pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dengan adanya sinergitas antara unsur dalam organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aparat pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, semoga mendukung terhadap terwujudnya visi Kabupaten Pangandaran yaitu **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**.

Cijulang, 15 Agustus 2021

KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19641116 199303 1 007